



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



PERJANJIAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TAHUN 2020



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan agar setiap unit kerja instansi pemerintah mulai eselon II ke atas menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah menyelenggarakan Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sesuai yang diamanatkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Sebagai implementasi telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan dokumen yang memuat pernyataan pertanggungjawaban kinerja setiap pimpinan terhadap pimpinan yang di atasnya untuk mewujudkan target kinerja pada tahun yang bersangkutan. Perjanjian Kinerja juga merupakan pertanggungjawaban

anggaran yang telah diterima yang dimana / dan anggaran tersebut akan dipergunakan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Pimpinan akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **R. AGUS H. PURNOMO**
Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **BUDI KARYA SUMADI**
Jabatan : **MENTERI PERHUBUNGAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

**PIHAK KEDUA,
MENTERI PERHUBUNGAN**

BUDI KARYA SUMADI

**PIHAK PERTAMA,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

R. AGUS H. PURNOMO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM	SATUAN	TARGET 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Program : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut					
SP.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi laut	IKP1	Indeks konektivitas transportasi laut nasional	Rasio	0,89
		IKP2	Rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	%	24
SP.2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP3	Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	%	81,00
SP.3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP4	Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	/10.000 Pelayaran	1,23
		IKP5	Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	/100.000 Pelayaran	0,30
		IKP6	Tingkat kehandalan Kenavigasian	%	96,5
SP.4	Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP7	Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Rasio	0,2
		IKP8	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan pelayaran (kapal, pelabuhan dan pekerjaan bawah air) yang berhasil di tanggulangi	%	100

1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut	1.495.876.752.000
2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhanan	3.723.235.178.000
3. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan	43.512.870.000
4. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian	329.788.782.000
5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai	66.280.508.000
6. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hubla	3.889.101.515.000
Jumlah	9.547.795.605.000,000

MENTERI

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

BUDI KARYA SUMADI

R. AGUS H. PURNOMO